

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara demokratis yang menganut asas pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹ Salah satu bentuk demokrasi yang sudah menjadi tradisi bagi Negara Indonesia adalah Pemilihan Umum (Pemilu) yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan umum atau yang selanjutnya disebut dengan Pemilu merupakan salah satu prasyarat negara demokrasi yang dilakukan secara regular guna membentuk pemerintahan yang demokratis. Umumnya Pemilu dimaknai sebagai realisasi kedaulatan rakyat dan juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi rakyat.²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Presiden dan Wakil Presiden, serta memiliki Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

¹ Iqra Ramadhan, Indonesia Adalah Negara Demokrasi, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 1, Nomor 1, 2017, hal. 1

² Sri Hastuti P, Pemilu dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu, *Jurnal Hukum dan Politik*, Volume 7, Nomor 3, 2018, hal. 136

Dari aturan tersebut, maka salah satu bentuk pemilihan umum yang telah dilakukan di Negara Indonesia adalah pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau yang disebut dengan pilkada atau pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di seluruh wilayah Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.³

Hal ini berarti tidak ada larangan bagi siapapun, baik itu tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan selama masih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan memenuhi syarat untuk menjadi kepala daerah, maka diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Namun selama ini, calon-calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada di Indonesia mayoritas adalah kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan masih sangat terbatas.

Walaupun ada kaum perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, tapi kemungkinan untuk terpilih sangat kecil dibanding calon kepala daerah laki-laki, sehingga keterlibatan perempuan hanya sebatas kandidat dalam Pilkada.⁴ Hal ini menjadi indikasi bahwa keterwakilan perempuan dibidang politik itu masih sangat terbatas.

Padahal saat ini eksistensi perempuan sudah mengalami perubahan dibanding zaman dahulu. Pada zaman dahulu perempuan dianggap tidak perlu sekolah, tidak

³ Muhamad Rachbi dan Sherly M. I. Slamet, Analisis Yuridis Perihal Syarat-Syarat pencalonan Kepala Daerah Melalui Calon Independent, *Jurnal Dialektika Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2020, hlm. 98

⁴ Gustiana A. Kambo, Penguatan Identitas Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Magister Ilmu Politik*, Volume 3, Nomor 1, 2017, hlm. 2

boleh berkarir dan tidak boleh menjadi pemimpin, karena identiknya pemimpin adalah kaum laki-laki. Namun semenjak adanya emansipasi wanita yang digagas oleh R.A Kartini maka muncullah kebijakan afirmasi yang membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam aktivitas politik dan kebijakan publik di negara yang mewajibkan melibatkan perempuan.

Meskipun sudah ada kebijakan tersebut dan semakin banyaknya wanita yang memiliki pendidikan tinggi, namun tradisi ini tidak bisa hilang dari sebagian besar kehidupan masyarakat di Indonesia. Bagi sebagian besar masyarakat memiliki anggapan bahwa perempuan kurang layak apabila dijadikan pemimpin, sedangkan laki-laki jauh lebih layak karena memiliki kewibawaan, ketegasan dan eksistensi yang lebih tinggi dibanding perempuan.⁵

Pada realitas politik yang terjadi di Indonesia, maka ada beberapa persoalan dalam masalah peran dan posisi gender antara laki-laki dan perempuan. Selama ini dalam dunia politik sering terjadi diskriminasi atau peminggiran politik terhadap perempuan didalam kehidupan demokrasi atau dunia politik. Pada konsep kompetisi, partisipasi politik ternyata hanya terbatas pada kaum laki-laki, walaupun ada perempuan yang terlibat, maka mereka harus berperilaku politik dalam dunia laki-laki.⁶

Kondisi ini yang menyebabkan keterwakilan perempuan sebagai pemimpin di Indonesia masih sangat kecil, dimana sejak 75 tahun merdeka maka hanya ada 1

⁵ Ade Muslimat, Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 3, Nomor 2, 2016, hlm. 18

⁶ *Ibid.* hlm. 20

perempuan yang berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri dengan masa jabatan 2001-2004 dan sampai saat ini belum ada kaum perempuan yang menduduki posisi tersebut. Selanjutnya sejak pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung, maka hanya ada beberapa perempuan yang berhasil menjadi kepala daerah, baik itu Gubernur, Bupati maupun Walikota. Misal seperti Tri Risma Harini yang berhasil menjadi walikota Surabaya, Khofifah Indar Parawansa yang menjadi Gubernur Jawa Timur dan Ratna Machmud yang berhasil menjadi Bupati Musi Rawas.

Salah satu wilayah dengan minimnya keterwakilan perempuan sebagai kepala daerah adalah Provinsi Jambi, dimana hanya ada 1 kepala daerah perempuan yaitu Masnah Busro sebagai Bupati Muaro Jambi. Masnah Busro merupakan perempuan pertama dan satu-satunya yang berhasil menduduki jabatan sebagai Bupati. Padahal banyak perempuan yang mulai berani untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di Provinsi Jambi, namun mereka menemui kegagalan dalam Pilkada.

Hal ini seperti yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Batanghari tahun 2020 lalu. Pada Pilkada tahun 2020 ada 3 pasangan calon Bupati dan wakil bupati Batanghari, salah satunya adalah Yuninnta Asmara dan calon wakilnya Muhammad Mahdan. Pada saat itu Yuninnta Asmara ini merupakan satu-satunya calon Bupati dari kaum perempuan, namun Yuninnta Asmara harus gagal melawan kandidat lain yang merupakan kaum laki-laki. Berikut adalah perolehan suara dari masing-masing calon Kepala Daerah pada Pilkada Kabupaten Batanghari tahun 2020:

Tabel 1.1.
Perolehan Suara Calon Kepala Daerah Kabupaten Batanghari Pada
Pilkada 2020

No	Nama Kandidat	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	Yunninta Asmara dan Muhammad Mahdan	50.486	31,39
2	Muhammad Firdaus dan Camelia Puji Astuti	49.528	30,79
3	Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar	60.842	37,82
	Total	160.856	100

Sumber : KPU Kabupaten Batanghari (2022)

Berdasarkan data di atas, maka pada Pilkada tahun 2020 ada 3 kandidat Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, dimana dari ke-3 calon tersebut maka hanya ada 1 calon Kepala Daerah perempuan yaitu Yunninta Asmara dengan wakil Muhammad Mahdan dan selebihnya adalah calon Kepala daerah laki-laki. Namun Pada saat itu,

suara Yuninnta Asmara dan Muhammad Mahdan hanya 31,39% dan kalah dibanding pasangan Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar yang memperoleh suara 37,82%.

Artinya minat masyarakat untuk memberikan hak pilihnya pada calon Kepala Daerah perempuan masih sangat minim, karena masyarakat lebih berantusias untuk memilih calon Kepala Daerah laki-laki. Kondisi ini menjadi gambaran bahwa masyarakat di Kabupaten Batanghari masih minim kepercayaan terhadap kemampuan perempuan untuk menjadi pemimpin.

Dari hasil Pilkada 2020 tersebut, maka calon yang berhasil menduduki jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batanghari adalah mereka yang berasal dari kaum laki-laki. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, mengapa masyarakat pada Pilkada 2020 ini lebih banyak yang memilih memberikan hak pilihnya pada calon laki-laki. Sementara pada tahun 2015 lalu, masyarakat masih memilih calon Kepala Daerah yang memiliki calon Wakilnya dari kaum perempuan.

Apabila dikaitkan dengan potensi dari Yuninnta Asmara, maka Yuninnta memiliki potensi politik yang kuat dan sangat berpengaruh di sistem pemerintahan Kabupaten Batanghari. Hal ini dikarenakan Yuninnta Asmara adalah istri dari Syahirsah yang pernah menjabat sebagai wakil Bupati Batanghari periode 2001-2006 serta menjadi Bupati Batanghari 2 periode yaitu 2006-2011 dan 2016-2021.⁷

Keberadaan orang-orang terdekat yang pernah menjabat sebagai kepala Daerah Batanghari tentu menjadikan Camelia Puji Astuti dan Yuninnta Asmara sebagai calon

⁷ <https://jambiberita.com/read/2020/06/10/5959497/sosok-yuninnta-asmara-petarung-yang-selalu-hadir-di-tengah-pandemi> diakses 27 April 2022

yang memiliki keunggulan dibanding calon lain, karena masyarakat tentu sudah mengenal sosok mereka. Tapi faktanya peran orang-orang terdekat tidak mampu mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih mereka.

Selanjutnya Camelia Puji Astuti dan Yuninnta Asmara juga memiliki pengalaman politik yang tidak kalah penting, dimana keduanya adalah politikus yang sama-sama pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Batanghari. Artinya pada saat pemilihan legislative, masyarakat mau dan bersedia memberikan hak pilihnya pada kedua calon ini. Namun pada faktanya kemampuan berpolitik yang mereka miliki tidak bisa menjadikan mereka menang dalam Pilkada Kabupaten Batanghari.

Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan mengenai penyebab kegagalan calon Bupati perempuan dalam Pilkada Kabupaten Batanghari. Apabila disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan masih minim, tapi masyarakat pernah memilih kedua calon ini sebagai anggota legislative yang artinya masyarakat percaya bahwa Camelia dan Yuninnta memiliki kemampuan dalam berpolitik. Oleh karena itu, perlu ada penelusuran lebih lanjut mengenai penyebab-penyebab yang menjadi latarbelakang kegagalan dua calon perempuan sebagai kepala daerah di Kabupaten Batanghari.

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah:

Penelitian Syalfia yang berjudul “Kegagalan Calon Perempuan dalam Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2013 (Studi Kasus Fauziah, S.E)”, dimana

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan pasangan calon perempuan disebabkan oleh faktor gender dan strategi politik. Adapun faktor yang mempengaruhi kegagalan calon perempuan adalah faktor isu politik gender, keterlambatan pencalonan, faktor finansial, faktor politik primordial dan faktor pelanggaran dalam pemilukada. Hendaknya setiap kandidat baik laki-laki maupun perempuan baiknya mempersiapkan dan melakukan sosialisasi dari jauh hari dan berpartisipasi perempuan dalam dunia politik memerlukan dukungan dari semua pihak dan perlunya pendidikan politik perempuan jadi sangat penting untuk dapat bersaing dengan kandidat laki-laki.⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama ingin mengamati dan mengkaji tentang kegagalan calon perempuan dalam Pilkada. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian terdahulu objeknya adalah Fauzah S.E dan Pemilukada Kabupaten Merangin tahun 2013, sedangkan penelitian peneliti adalah calon kepala daerah perempuan pada Pilkada Kabupaten Batanghari tahun 2015 dan 2020.

Penelitian Kumalasari dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan *Incumbent* Perempuan pada Pemilihan Legislatif DPRD Kota Semarang Tahun 2014” dengan hasil sebagai berikut pola kegagalan yang dialami oleh *incumbent* perempuan hampir sama yakni disebabkan oleh faktor rendahnya suara individu. Tiga diantaranya dari partai yang sama dan mengaku bahwa sebab dari hal

⁸ Syalfa, Kegagalan Calon Perempuan dalam Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2013 (Studi Kasus Fauziah, S.E), *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 1, 2015, hlm. 5-6

ini adalah adanya pengaruh dari internal partai. Selain itu, fakta menunjukkan bahwa formulir C1 yang digunakan panitia penyelenggara pemungutan suara saat itu hasilnya berbeda antara yang dimiliki saksi khusus di TPS dengan hasil di Kelurahan maupun Kecamatan, sehingga disinyalir terdapat tindak curang oleh panitia penyelenggara pemungutan suara.⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama ingin mengetahui penyebab kegagalan pada calon perempuan. Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu adalah calon *incumbent* perempuan atau petahan dalam pemilihan legislative, sedangkan penelitian peneliti itu calon perempuan pada Pilkada dan bukan merupakan calon petahana.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penyebab Kegagalan Calon Kepala Daerah Perempuan dalam Pilkada Kabupaten Batanghari Tahun 2020**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja penyebab kegagalan calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada Kabupaten Batanghari tahun 2020?
2. Bagaimana potensi yang dimiliki calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada Kabupaten Batanghari tahun 2020?

⁹ Putri Kulamasari, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan *Incumbent* Perempuan pada Pemilihan Legislatif DPRD Kota Semarang Tahun 2014, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm. 2

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab kegagalan calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada Kabupaten Batanghari tahun 2020.
2. Untuk mengetahui potensi yang dimiliki calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada Kabupaten Batanghari tahun 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan dari penelitian ini dilakukan, dimana manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat praktis dan teoritis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sistem marketing politik yang tepat untuk dilakukan dan penyebab kegagalan yang harus diminimalisir oleh calon kepala daerah perempuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai penambah wawasan mengenai upaya-upaya yang tepat untuk dilakukan oleh calon kepala daerah perempuan agar tidak mengalami kegagalan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang penyebab kegagalan calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan gejala alam atau tuntutan yang menghendaki kesetaraan, yang harus di respon oleh umat manusia dalam rangka adaptasi dengan alam. Sekarang tuntutan kesetaraan gender menjadi permasalahan yang menjadi perhatian manusia di seluruh dunia juga karena alam menuntut demikian disebabkan adanya perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berlaku di masyarakat yang memungkinkan peran laki-laki dan perempuan bisa sama atau dipertukarkan.¹⁰

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut:¹¹

a. Akses

¹⁰ Ace Suryadi dan E. Idris. *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan*, (Bandung: Genesindo, 2004), hlm. 7

¹¹ *Ibid.* hlm: 12.

Yang dimaksud dengan aspek akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya yang akan dibuat. Sebagai contoh dalam hal pendidikan bagi guru adalah akses memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikan untuk guru perempuan dan laki-laki diberikan secara adil dan setara atau tidak.

b. Partisipasi

Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini guru perempuan dan laki-laki apakah memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan di sekolah atau tidak.

c. Kontrol

Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan sekolah sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak.

d. Manfaat

Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak.

Kesetaraan gender juga sudah berlaku dalam sistem politik, dimana ada beberapa teori gender yang melatarbelakangi hubungan perempuan dan politik. Adapun tersebut adalah *feminis multikulturalism* yang dikembangkan oleh (Will Kymlica dan Rose Marie Tong).¹² Menurut teori feminis multiculturalism semua perempuan diciptakan setara, tidak bergantung kepada ras, kelas, dan juga kecendrungan usia, agama, pencapaian pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, kondisi kesehatan dan sebagainya. Kesetaraan yang dimaksud bukan saja hanya pada kuantitas seperti dalam pandangan feminis tradisional namun lebih dari itu yaitu menghindari sifat opresi yang dibuat oleh kelompok yang memiliki kekuatan, dimana hanya memandang perempuan sebagai manusia nomor dua.¹³

Teori feminis multikulturalisme menumbuhkan toleransi, penghargaan dan pengetahuan bersama atas kebudayaan satu sama lainnya dan untuk memastikan semua manusia mempunyai keahlian dan hak yang dibutuhkan untuk bersaing dalam pasar ekonomi dan arena politik.¹⁴

Diskriminasi perempuan dalam politik sebenarnya bukan sesuatu yang turun dari kodrat, melainkan adanya budaya masyarakat yang diterapkan secara terus-menerus. Masyarakat dan negara patriarki menganggap perempuan sebagai kelompok penting, namun dipihak lain perempuan menjadi korban dari

¹² M.R. Muchlis, *Sistem Sosial dan Politik Indonesia*, (Jakarta: Pencerah Generasi Antarbangsa, 2020), hlm. 43

¹³ *Ibid.* hlm. 44

¹⁴ *Ibid.* hlm. 45

berbagai praktik kehidupan dan kebijakan negara yang sangat patriarki dan bias gender. Istilah patriarki sendiri digunakan untuk menggambarkan sistem sosial atau ideology dimana laki-laki sebagai kelompok dominan mengendalikan kekuasaan terhadap kelompok perempuan.¹⁵

Perilaku manusia/individu dipengaruhi oleh kontruksi biologis, sosial, dan agama. Dalam upaya mengubah perilaku seseorang terhadap pemahaman gender, ada beberapa istilah mengenai konsep perubahan perilaku gender yaitu:¹⁶

- a. Buta Gender (*gender blind*), yaitu kondisi/keadaan seseorang yang tidak memahami tentang pengertian/ konsep gender karena ada perbedaan kepentingan laki-laki dan perempuan.
- b. Sadar Gender (*gender awareness*), yaitu kondisi/ keadaan seseorang yang sudah menyadari kesamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki.
- c. Peka/Sensitive Gender (*gender sensitive*), yaitu kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari persektif gender (d disesuaikan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan).

¹⁵ Lusya Palulungan., M.G.H. Kordi dan M.T. Ramli, *Perempuan Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender*, (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2019), hlm. 39

¹⁶ Suharjuddin, *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020), hlm. 25

- d. Mawas Gender (*gender perspective*), yaitu kemampuan seseorang memandang suatu keadaan berdasarkan perspektif gender.
- e. Peduli/Responsif Gender (*gender concern/responsive*), merupakan keadaan dimana kebijakan/program/ kegiatan atau kondisi yang sudah dilakukan dengan memperhitungkan kepentingan kedua jenis kelamin.

Dari hal tersebut, tetapi masih terjadi beberapa permasalahan mengenai kesetaraan gender yang disebut dengan ketimpangan gender. Ketimpangan gender merupakan sebenarnya bukan suatu masalah sepanjang tidak menimbulkan *gender inequalities* (ketidakadilan gender). Namun yang menjadi masalah adalah ternyata perbedaan gender (*Gender differences*) ini telah menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan utamanya terhadap kaum perempuan. Secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya dapat hamil, melahirkan dan menyusui, kemudian muncul gender role (peran gender) sebagai perawat, pengasuh dan pendidik anak. Dengan demikian gender role dianggap tidak menimbulkan masalah dan tidak perlu digugat. Namun yang menjadi masalah dan perlu dipertanyakan adalah struktur gender inequalities yang ditimbulkan oleh gender role dan gender differences.¹⁷

Gender inequalities (ketidakadilan gender) merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban sistem tersebut. Dengan demikian agar dapat memahami perbedaan gender yang menyebabkan

¹⁷ *Ibid.* hlm. 25-26

ketidakadilan maka dapat dilihat dari berbagai manifestasinya, yaitu sebagai berikut:¹⁸

a. Marginalisasi

Bentuk marginalisasi yang paling dominan terjadi terhadap kaum perempuan adalah disebabkan gender. Meskipun tidak setiap bentuk marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipermasalahkan disini adalah bentuk marginalisasi yang disebabkan oleh gender differences (perbedaan gender)

b. Subordinasi

Subordinasi timbul sebagai akibat adanya pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting umumnya muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional atau irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin merupakan bentuk dari subordinasi yang dimaksud. Proses subordinasi yang disebabkan karena gender terjadi dalam segala macam bentuk dan mekanisme yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat.

c. Stereotipe

Pelabelan dan penandaan/stigma negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu, secara umum dinamakan stereotip. Akibat dari stereotipe ini biasanya timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 26-28

Salah satu bentuk stereotipe ini adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali stereotipe yang umumnya dilekatkan kepada kaum perempuan yang terjadi dimasyarakat sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan.

d. Violence

Violence (kekerasan) merupakan assault (invasi) atau serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya pada perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Bentuk dari kekerasan ini seperti pemerkosaan dan pemukulan, hingga pada bentuk yang lebih halus lagi seperti sexual harrasement (pelecehan) dan menciptakan ketergantungan. Violence terhadap perempuan banyak terjadi disebabkan oleh faktor stereotipe gender. Gender violence pada dasarnya disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada di dalam masyarakat.

e. Beban kerja

Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama jika dibanding dengan kaum laki-laki. Beban kerja yang diakibatkan oleh bias gender tersebut kerap kali diperkuat dan disebabkan oleh adanya

keyakinan/ pandangan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan, seperti semua pekerjaan domestik dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, dan dikategorikan sebagai pekerjaan yang bukan produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi Negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya dalam Pilkada sebagai calon kepala daerah, dimana perempuan juga harus memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dengan calon laki-laki.

1.6. Landasan Konseptual

1.6.1. Analisis

Analisis bermakna suatu kegiatan untuk mengamati dan menafsirkan sebuah objek atau fakta berdasarkan sifatnya, hubungan atau kaitan antar bagian, serta hubungan-hubungan antara bagian dan keseluruhannya. Apabila dikaitkan dengan politik, maka analisis ini lebih mengarah kepada

penafsiran yang dipusatkan pada hubungan sebab-akibat dari tindakan-tindakan politik.¹⁹

Analisis dapat diartikan sebagai sebuah telaah kritis terhadap isu tertentu yang dilakukan oleh analis dan para pihak menggunakan ragam pendekatan dan metode untuk menghasilkan nasihat atau rekomendasi guna membantu pihak-pihak yang membutuhkan solusi atas masalah-masalah dengan fakta yang relevan.²⁰

Analisis merupakan sebuah tindakan atau aktivitas berorientasi pada intervensi yang termasuk di dalamnya terhadap sesuatu yang sedang berlangsung atau sudah terjadi dan mengevaluasinya. Fokus dalam kegiatan analisis harus fokus dan berorientasi kepada pemberian dukungan dalam pengambilan keputusan yang sesuai kondisi.²¹

1.7. Kerangka Pemikiran

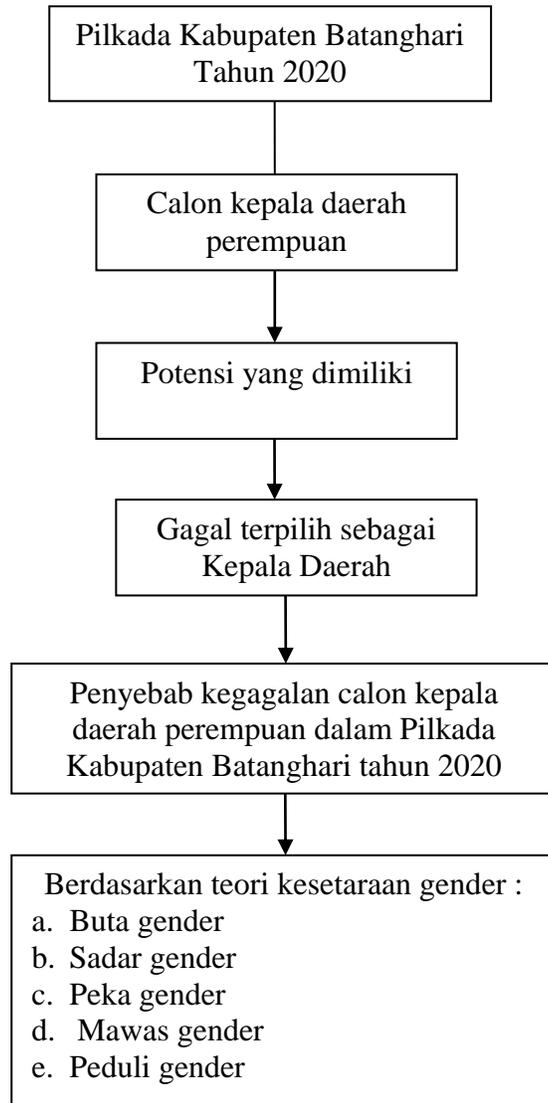
Kabupaten Batanghari merupakan salah satu Kabupaten yang pada tahun 2020 lalu mengikuti Pilkada serentak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Batanghari periode 2021-2025. Pada saat itu ada salah satu calon kepala daerah perempuan yaitu Yuninta Asmara yang sebelumnya telah memiliki berbagai potensi di bidang politik. Namun potensi yang dimiliki tersebut justru tidak bisa menarik simpati masyarakat, sehingga Yuninta Asmara gagal sebagai kepala daerah.

¹⁹ Pipin Hanapiah, *Analisis Politik*, (Bandung: UNPAD Press, 2011), hlm. 3

²⁰ Awan Y Abdoellah dan Yudi Rustiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 77

²¹ Afriva Khaidir, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Sumatera Barat: UNP Press, 2017), hlm. 56

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pemikiran kerangka berpikir dari penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, factual dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang ada di lapangan.²²

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan penyebab kegagalan calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada Kabupaten Batanghari tahun 2020.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Batanghari. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena selama 2 periode Pilkada di Kabupaten Batanghari itu terdapat kandidat calon kepala daerah perempuan yang sama-sama memiliki *background* politik di pemerintahan Kabupaten Batanghari, namun keduanya juga sama-sama gagal dalam Pilkada tersebut.

1.8.3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah penyebab kegagalan calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada Kabupaten Batanghari tahun 2020, serta potensi yang dimiliki calon kepala daerah perempuan.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 12

1.8.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor penting yang menjadi sumber pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari sumber asli atau responden untuk memperoleh data atau informasi yang akurat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sebagai bahan pendukung untuk memudahkan penelitian ini. data sekunder dapat bersumber dari buku-buku, catatan Kecamatan, literature dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan.

1.8.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau penentuan sampel secara sengaja berdasarkan ciri-ciri tertentu.²³ Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan yang memahami mengenai penyebab kegagalan calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada Kabupaten Batanghari tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, maka informan yang menjadi reponden dalam penelitian ini adalah:

²³ *Ibid.* hlm. 288

1. Yuninnta Asmara sebagai calon kepala daerah yang gagal pada Pilkada Kabupaten Batanghari tahun 2020 lalu sebanyak 1 orang.
2. Pengurus Partai Politik yang menjadi partai pengusung Yuninta Asmara pada Pilkada 2020 sebanyak 1 orang pengurus partai Golkar.
3. Ketua Tim pemenangan Yuninta Asmara pada Pilkada 2020 sebanyak 1 orang.
4. Masyarakat umum di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari sebanyak 5 orang.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan. Teknik wawancara digunakan untuk mewawancarai secara langsung penyebab kegagalan calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020.

b. Dokumentasi

Peneliti mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan, untuk mengambil data yang akurat dengan metode pengambilan gambar dan data-data tertulis untuk mendukung keabsahan data yang diperoleh.

1.8.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:²⁴

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Sehingga perlu dilakukan pemilihan data yang relevan untuk dapat disajikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di penelitian. Setelah melakukan pemilihan data, data yang telah dipilih kemudian disederhanakan dengan mengambil data yang pokok dan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.²⁵

b. Penyajian data

Data yang telah disusun melalui kegiatan reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Data yang disajikan adalah data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian

²⁴ *Ibid.* hlm. 294

²⁵ *Ibid.*

ini. Setelah data disajikan secara rinci, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.²⁶

c. Penarikan kesimpulan

Setelah data disajikan dan telah dibahas secara rinci, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengambilan kesimpulan. Tujuan dari penarikan kesimpulan adalah untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.²⁷

1.8.8. Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan tahapan penyesuaian data untuk melakukan keabsahan data. Penelitian ini menggunakan 4 jenis triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan. Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, menyediakan tambahan informasi secara sukarela, memastikan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data dan menilai kecakupan menyeluruh data yang dikumpulkan.²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*

²⁸ Andriana, D, *Triangulasi dan Keabsahan Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)..hlm.

2. Triangulasi dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah hasil observasi sesuai dengan informasi ketika di interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di interview dan observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.²⁹

3. Triangulasi dengan Teori

Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal ini dapat dilakukan sebagai pembandingan teori dengan menyertakan usaha pencarian teori dengan cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin mengarahkan pada upaya penemuan penelitian yang lebih relevan.³⁰

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* hlm. 175-176